



News Title : 1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Diblokir Bappebti	
Media Name : solopos.com	Journalist : Rohmah Ermawati
Publish Date : 05 February 2024	Tonality : Positive
News Page : 1	News Value : 3,000,000
Resources : Kasan (Plt Kepala Bappebti), Aldison (Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan)	Ads Value : 1,000,000
Section/Rubrication : Ekonomi	Topic : Blokir Domain Situs Web Situs Ilegal

1.855 Situs Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal Diblokir Bappebti

Rohmah Ermawati • Rohmah Ermawati • 5 Feb 2024 • 23:30 WIB



Solopos.com, JAKARTA Masyarakat diminta waspada karena penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan terkait Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) legal masih marak terjadi di Indonesia. Penawaran itu dilakukan melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (*smartphone*).

Sepanjang 2023 lalu, Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sepanjang telah memblokir 1.855 situs web yang melakukan kegiatan penawaran di bidang PBK yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pupuk Organik Cair dari Spirulina, Solusi saat Pupuk Langka

Pemblokiran dilakukan Bappebti untuk melindungi masyarakat dari potensi kerugian yang ditimbulkan dan memberikan kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang PBK.

"Penawaran melalui kegiatan promosi, iklan dan/atau pelatihan PBK legal masih marak terjadi di Indonesia melalui media sosial, situs web, maupun penggunaan aplikasi ponsel pintar (*smartphone*)" ungkap Plt Kepala Bappebti Kasan melalui pers rilis yang diarsipkan kemendag.go.id dan dikutip Kompas (1/2/2024).

Oleh sebab itu, dia meminta masyarakat agar selalu berhati-hati terhadap penawaran yang dilakukan oleh oknum atau pihak yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan UU No.12/1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, perdagangan berjangka adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan jual beli komoditi dengan penyerahan kemudian berdasarkan kontrak berjangka dan opini atas kontrak berjangka.

Perdagangan berjangka dilakukan di Bursa Berjangka, yang selanjutnya disebut dengan bursa, yang memperdagangkan kontrak berjangka berbagai komoditi. Tempat di mana kontrak berjangka diperdagangkan juga disebut pasar berjangka.

Dengan demikian di bursa akan terdapat banyak pasar berjangka sesuai dengan banyaknya komoditi yang diperdagangkan. Di bursa, pembeli dan penjual bertemu dan melakukan transaksi untuk membeli/menjual sejumlah komoditi untuk penyerahan di kemudian hari sesuai isi/spesifikasi kontrak.

Harga komoditi yang terbentuk di bursa berlangsung secara transparan. Transaksi di bursa dilakukan oleh para anggota bursa, yang terdiri dari Pialang Berjangka dan Pedagang Berjangka, baik dengan cara bertatap muka (*open outcry*) atau secara elektronik (*computerized order matching system*). Selanjutnya harga yang terjadi dicatat menurut buku penyerahan masing-masing Kontrak Berjangka dan diumumkan secara luas kepada masyarakat.

Menurut Kasan, Bappebti secara rutin dan berkelanjutan terus melakukan upaya preventif dan represif agar masyarakat merasa aman serta terhindar dari modus-modus penipuan dan potensi kerugian dari kegiatan PBK ilegal.

Di sisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan ke Bappebti bila menemukan adanya penawaran kegiatan ilegal di bidang PBK yang dilakukan melalui saluran media sosial resmi milik Bappebti atau datang langsung ke kantor Bappebti.

"Upaya tersebut merupakan bentuk kolaborasi antara Bappebti dengan masyarakat dalam memberantas kegiatan ilegal di bidang PBK. Bappebti berharap semakin banyak bentuk kolaborasi yang dibangun antara Bappebti dengan masyarakat, maka akan mengoptimalkan upaya pemberantasan aktivitas PBK ilegal yang saat ini tengah dilakukan," jelas Kasan.

Sementara itu, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan, Aldison, menegaskan setiap pihak yang melakukan kegiatan PBK di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti serta tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Entitas ilegal yang akan melakukan kegiatan usaha di Indonesia, wajib menggunakan perizinan kepada Bappebti sebelum melakukan kegiatan usaha di Indonesia. Jika ditemukan adanya kegiatan di bidang PBK tanpa memiliki izin, maka Bappebti akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku," lanjut Aldison tegas.

Situs web PBK ilegal yang telah dilakukan pemblokiran oleh Bappebti dapat dilakukan normalisasi apabila entitas pemilik situs web tersebut beritikad baik untuk mengurus perizinan ke Bappebti.

Langkah ini dilakukan sebagai upaya pembinaan terhadap entitas ilegal untuk patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBK, serta dalam rangka membentuk iklim persaingan usaha di bidang PBK yang sehat.

"Selain pastikan legalitas perusahaan dan tidak mudah terguruh terhadap penawaran yang memberikan iming-iming keuntungan di luar kewajaran dalam waktu singkat. Sebelum memutuskan untuk bertransaksi, ketahui terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK dengan cara mengakses situs web resmi Bappebti melalui tautan <https://cek.legalitas.bappebti.go.id/>,* pungkas Aldison.